

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara peneliti menyimpulkan bahwa :

1. DISPENDUK telah berhasil dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu terkait pembuatan akta kelahiran dengan baik. Integrasi yang baik antara proses dan sistem, pemahaman yang mendalam tentang tugas dan pekerjaan, upaya meningkatkan kualitas layanan, dan komitmen untuk peningkatan berkelanjutan menjadi poin-poin kunci yang disorot. Dengan demikian, DISPENDUK mampu memberikan layanan administrasi terpadu yang efektif, efisien, dan responsif kepada masyarakat Kabupaten TTU, yang pada gilirannya memberikan dampak positif bagi proses administrasi kependudukan secara keseluruhan.
2. DISPENDUK telah berhasil dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu terkait pembuatan akta kelahiran dengan baik. Mekanisme terintegrasi, ketelitian dalam pelayanan, kontribusi Sub Koordinator, dampak positif bagi masyarakat, dan komitmen untuk terus meningkatkan layanan menjadi poin-poin kunci yang disorot. Integrasi layanan administrasi yang baik dan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan menjadi landasan yang kuat bagi

DISPENDUK dalam memberikan pelayanan yang efisien, berkualitas, dan responsif kepada masyarakat Kabupaten TTU.

3. DISPENDUK telah berhasil dalam memberikan pelayanan administrasi terpadu terkait pembuatan akta kelahiran dengan konsisten dan berkualitas. Dedikasi, tanggung jawab, dan komitmen pegawai menjadi poin penting yang memastikan terlaksananya pelayanan yang efektif dan terintegrasi. Dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai serta pengembangan pegawai melalui pelatihan juga menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja DISPENDUK dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten TTU.
4. Komitmen yang kuat dari para pegawai DISPENDUK dalam meningkatkan pelayanan administrasi terpadu terkait pembuatan akta kelahiran. Inisiatif-inisiatif tersebut mencerminkan upaya untuk memperbaiki efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas layanan, serta meningkatkan interaksi proaktif dengan masyarakat. Evaluasi berkala dan komunikasi terbuka dengan masyarakat menjadi bagian integral dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan.
5. Komitmen DISPENDUK Kabupaten TTU dalam menyediakan pelayanan administrasi terpadu yang berkualitas dan terintegrasi. Tanggung jawab Kepala Dinas dan Sub Koordinator serta sikap dan tanggung jawab pegawai mencerminkan upaya mereka dalam menciptakan lingkungan pelayanan yang positif dan memuaskan bagi masyarakat. Dengan fokus pada koordinasi yang efektif, peningkatan mutu layanan, dan sikap profesionalisme, DISPENDUK berusaha untuk memastikan bahwa setiap proses pelayanan administrasi

terpadu terkait pembuatan akta kelahiran berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten TTU.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran terkait Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai berikut:

Kepada pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTU.

1. Para pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan agar meningkatkan kemampuan individu yaitu dengan mengikuti pelatihan/BIMTEK sebagai bentuk pengembangan diri dalam menjamin kualitas layanan yang lebih bermutu kepada masyarakat terkait dengan layanan administrasi kependudukan.
2. Para pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam menjamin kepemilikan dokumen masyarakat harus memberikan informasi dan sosialisasi rutin yang diharapkan lebih menyeluruh kepada semua masyarakat agar masyarakat sadar dan merasa penting untuk mengurus akta kelahiran.
3. Terus tingkat pelayanan kepada masyarakat pastikan petugas di Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil selalu ramah dan responsif dalam permintaan masyarakat, membuat proses pengajuan akta kelahiran lebih muda dan lebih terjangkau bagi semua lapisan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

4. Peningkatan teknologi untuk mempercepat proses penerbitan akta kelahiran, termasuk penerapan sistem online untuk pengajuan dan pemrosesan dokumen, pelatihan dan pengembangan staf untuk menjalankan tugas mereka dengan efisien dan akurat.

Kepada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara :Diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara untuk lebih meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memiliki akta kelahiran dan prosedurnya, termasuk manfaat yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adya Atep 2003, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Persiapan Membangun Budaya Pelayanan, Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan* Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta.
- Arianto N 2018, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan* Jurnal Pemasaran Kompetitif Bogor.
- All Et.L James Gibson 1995, *Organisasi, perilaku, struktur*, proses jilid1edisi Kedelapan Erlangga Jakarta.
- Dwiyanto Agus ddk 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, pusat Gajah Mada pers, Yogyakarta.
- Dwiyanto A 1995, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik* Fisipol Universitas Gaja Mada Yogyakarta.
- Daryanto dan Bintarti 2017, *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan* Cetakan 1 Gava Media Yogyakarta.
- Daryanto 2003, *Belajar Komputer Visual Basic*. : CV. Yrama Widya Malang.
- Et, All, Gibson, 1995, *Organisasi Dan Manajemen* Edisi ke Empat Erlangga Jakarta.
- Handoko, T., Hani, 1998, *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Liberty.
- Irham Fahmi 2011, *Manajemen kinerja Teori dan Aplikasi*. Cetakan Kedua cv Alfabeta Bandung.
- Kasmir 2006, *Kewirausahaan* Rajawali Pers Jakarta.
- Moneir A.S 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* PT. Bumi Aksara Jakarta.
- Mustari Mohamad 2011, *Nilai kerakter Refleksi Untuk Pendidikan*Krakter. Pressindo Yogyakarta.
- Mangkunegara Perabu Anwar 2005, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, penerbit Refika Aditama Bandung.
- Mangkunegara Perabu A.A. Anwar 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Remaja rosdakary Bandung.
- Moehariono 2014, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi* Edisi Revisi, PT Rajagrafindo Persada Jakarta.

- Moneir 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi As kara. Bandung.
- Pasalong Hurbani 2010, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta: Bandung.
- Philip, Kotler 2006, *Manajemen Pemasaran*, jilid 1 Edisi kesebelas PT Indeks Gramedia Jakarta.
- Rivai dan Muliadi 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan kesembilan Jakarta.
- Rasul Sjahrudin 2002 *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran* jakarta.
- Ratminto 2006, *Manajemen Pelayanan* Pustaka belajar Yogyakarta.
- Sedarmayanti, M.Pd., APU. 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Siagian, Sondang. P. 2006. *Filsafat Administrasi*. Edisi revisi. Jakarta; Bumi Aksara,
- Sinabela Poltak Lijan 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara Jakarta.
- Sedarmayanti, M.Pd.,APU. 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Penerbit Mandar Maju Bandung
- Sedarmayanti 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, CV Mandar Maju Bandung.
- Simamora Henry 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,STIE YKPN Yogyakarta.
- Simamora Henry 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,Sekolah tinggi ilmu ekonomi YKPN Yogyakarta.
- Sedarmayanti 2001, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* Mandar Maju Bandung.
- Sinabela Poltak Lijan 2008, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Askara jakarta.
- Sinabela Poltak Lijan 2008, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara Jakarta.
- S. M. Suryadi Edi Dr. 2018. *Strategi Komunikasi : sebuah analisis teori dan praktis di era global*. Bandung: remaja rosdakarya.
- Sutrisno E 2017, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Jakarta.

Winarsih Septi Atik & Ratminto 2006 *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar Jakarta.

Wibowo 2010. *Manajemen Kinerja*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sumber Lain :

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Pegawai Sipil Negara.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undanng-Undang No 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Kependudukan Berbasis Elektronik

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 94 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pencatatan Sipil

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.13-325 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota.

Kep. MENPAN No.25 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Publik.

Kep. MENPAN No.26/KEP/M.PAN Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kep. MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang standar Pelayanan Publik.